



JAKK - UHO

**JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN  
KESEHATAN  
(JAKK-UHO)**

**Vol. 4/No. 1/Bulan April Tahun 2023**

**e-ISSN: 2797-6831**

**STUDI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI  
PUSKESMAS LOMBAKASIH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022**

**Tessa Putri Atirah<sup>1\*</sup>, Fithria<sup>2\*\*</sup>, Rahman<sup>3\*\*\*</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo  
tessaputriatirah29@gmail.com<sup>1</sup>, fithria@uho.ac.id<sup>2</sup>, rahmankmpkugm@gmail.com<sup>3</sup>

**INFO ARTIKEL**

**Kata kunci:** *Pengelolaan, Dana BOK, Puskesmas*

**\*Korespondensi:**

Tessa Putri Atirah

Universitas Halu Oleo

Kampus Bumi Tridharma Jln. H.E.A.  
Mokodompit, Andonouhu  
Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

**Email:** jakk-uho@uho.ac.id

**Copyright:** © 2016 Author et al. This is an open access article distributed under the terms of the [JAKK-UHO Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)

Published by Universitas Halu Oleo

**Laman:**

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/jakk-uho>

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Poskedes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Pada pengelolaan dana BOK di Puskesmas Lombokasih masih terdapat beberapa kendala sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal.

**Tujuan:** Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOK di Puskesmas Lombokasih Kabupaten Bombana Tahun 2022.

**Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 2 informan kunci dan 5 informan biasa.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan pada awal tahun dalam mini lokakarya yang terdiri atas kegiatan, tujuan, waktu serta sasaran yang akan dilakukan. Pelaksanaan melibatkan Kepala Puskesmas, Bendahara BOK, KTU, dan para Programmer. Pengawasan dilakukan secara internal meliputi pengawasan Kepala Puskesmas, PPK, PPTK dan eksternal yang dilakukan oleh inspektorat dan BPK. Pencatatan dan pelaporan meliputi hasil pencapaian target kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan serta dilengkapi bukti penggunaan dana. Namun dalam pelaksanaannya masih ada keterlambatan Programmer dalam pembuatan pertanggungjawaban yang mengakibatkan dana BOK terlambat cair.

**Kesimpulan:** Dalam perencanaan yang dilakukan masih terdapat kurangnya pemahaman tim pengelola BOK yaitu Programmer terhadap juknis. Adapun pelaksanaan, jalannya program yang kadang tidak sesuai jadwal dikarenakan faktor cuaca. Untuk Pengawasan yang dilakukan di Puskesmas Lombokasih sudah baik yang melibatkan Kepala Puskesmas, PPK, PPTK, serta Inspektorat dan BPK. Sedangkan, pencatatan dan pelaporan sering tidak tepat waktu dalam melakukan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sehingga Pihak Puskesmas diharapkan untuk memberikan pemahaman yang merata tentang mekanisme pelaksanaan dalam mengelola dana Bantuan Operasional

Kesehatan agar lebih optimal.

#### **Abstract**

**Background:** Health Operational Assistance (BOK) is the Ministry of Health's State Revenue and Expenditure Budget (APBN) funds and is central government assistance to local governments channeled through the co-administration mechanism to accelerate the achievement of national priority health program targets through improving the performance of the Puskesmas and its network, as well as UKBM in particular Poskesdes/Polindes, Posyandu, School Health Enterprises (UKS) in providing promotive and preventive health services. In the management of BOK funds at the Lombokasih Health Center there are still several obstacles so that the implementation is not optimal.

**Objectives:** this study aims to obtain information about the management of BOK funds at the Lombokasih Health Center in Bombana Regency in 2022.

**Method:** The type of research used is qualitative research with an approach case studies through in-depth interviews. There were 7 informants in this study, consisting of 2 key informants and 5 casual informants.

**Results:** The results showed that planning was carried out at the beginning of the year in a mini workshop consisting of activities, goals, time and objectives to be carried out. The implementation involved the Head of the Health Center, BOK Treasurer, KTU, and *Programmers*. Supervision is carried out internally including supervision of the Head of the Puskesmas, PPK, PPTK and externally which is carried out by the inspectorate and BPK. Recording and reporting includes the results of achieving the target of the activities carried out, the time of implementation and is accompanied by evidence of the use of funds. However, in practice there are still programmer delays in making accountability which results in late disbursement of BOK funds.

**Conclusion:** In the planning that was carried out there was still a lack of understanding of the BOK management team, namely *Programmers*, towards technical guidelines. As for the implementation, the program sometimes does not go according to schedule due to weather factors. The supervision carried out at the Lombokasih Health Center has been good, involving the Head of the Health Center, PPK, PPTK, as well as the Inspectorate and BPK. Meanwhile, recording and reporting often not timely in carrying out accountability reporting on the implementation of health services as a whole. So that the Puskesmas is expected to provide an even understanding of the implementation mechanism in managing Health Operational Assistance funds so that it is more optimal.

## **PENDAHULUAN**

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan untuk percepatan pencapaian target program kesehatan prioritas nasional melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya, serta UKBM khususnya Polkesdes/Polindes, Posyandu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif (Kemenkes RI, 2015b).

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu program unggulan kementerian kesehatan. BOK merupakan upaya pemerintah untuk membantu daerah dalam mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewenangan wajib daerah, karena tidak semua kabupaten/kota mempunyai kecukupan anggaran atau kepedulian untuk membiayai pembangunan kesehatan, khususnya di Puskesmas. Dimana Puskesmas sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan dimasyarakat, terutama upaya promotif dan preventif (Yuliantini et al., 2019).

Saat ini BOK cenderung menjadi anggaran utama untuk operasional program kesehatan di Puskesmas. Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional program kesehatan di Puskesmas semakin menurun, sehingga kinerja Puskesmas cenderung statis. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dan peraturan yang mengatur dana kapitasi untuk Puskesmas, diharapkan terjadi sinergisme pembiayaan operasional Puskesmas, sehingga akan semakin meningkatkan capaian pembangunan kesehatan (Kemenkes RI, 2015b).

Berdasarkan data survey cepat evaluasi pelaksanaan DAK nonfisik (BOK) di Indonesia pada tahun 2016, ditemukan hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Daerah yang mendapatkan hambatan dalam perencanaan dana alokasi khusus (BOK) sebesar 51% dari 263 Kabupaten/Kota, hambatannya berupa adanya pengelola yang tidak melibatkan Puskesmas/pengelola program, petunjuk teknis yang tidak dimengerti, dan adanya aturan APBD belum mengkomodir menu BOK. Hambatan dalam pelaksanaan BOK sebesar 73% disebabkan tidak tersosialisasi petunjuk teknis/administratif keuangannya, kesulitan pencairan dana BOK, penggunaan dana BOK tidak dapat langsung digunakan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 289 Puskesmas yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota sebanyak Rp 272.369.044.762 (Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, 2021). Untuk Alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, dimana Kabupaten Bombana terdiri dari 22 Puskesmas sebesar Rp 16.914.614.000 pada tahun 2020, dan meningkat sebesar Rp 17.732.524.400 pada tahun 2021 (Dinkes Bombana, 2021).

Tahap survey awal yang dilakukan di Puskesmas Lombakasih Kabupaten Bombana berdasarkan profil Puskesmas dengan hasil survey tersebut, bahwa alokasi dana BOK di Puskesmas Lombakasih tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.425.533.500 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 1.475.287.389 (Profil Puskesmas Lombakasih, 2021). Berdasarkan hasil survey, permasalahan secara umum yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOK di Puskesmas Lombakasih didapatkan masalah atau kendala dalam proses pengelolaannya sehingga masih banyak program yang ditunjang oleh dana BOK belum berhasil, dimana perencanaan yang dilakukan belum dapat terealisasi secara optimal dikarenakan masih kurangnya tingkat pemahaman tim pengelola BOK yaitu *Programmer* terhadap juknis dalam mendukung program BOK, beberapa programmer yang terkadang terlambat memasukkan usulan kegiatan, dan pengklaiman jumlah frekuensi kegiatan oleh programmer, Selain itu, dalam pelaksanaan jalannya program yang kadang tidak sesuai jadwal, faktor cuaca yang sering kali menghambat pelaksanaan di lapangan sehingga dampaknya program tidak berjalan atau terlaksana. Pengawasan hanya dilakukan oleh Inspektorat saja dan hanya memeriksa atau mengaudit Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK saja. Apabila terdapat temuan maka pengawas fungsional akan melakukan penelusuran ke program. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh BPK untuk memantau pemanfaatan dana BOK di Puskesmas, biasanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kemudian pencatatan dan pelaporan masalah yang ditemui adalah pihak Puskesmas Lombakasih sering tidak tepat waktu dalam melakukan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Permasalahan ini harus dapat diselesaikan oleh Puskesmas sehingga target dari setiap program dapat tercapai.

Beberapa program yang ditunjang oleh dana BOK yang belum berhasil seperti halnya program upaya kesehatan masyarakat yaitu perbaikan gizi masyarakat, realisasi hanya mencapai 68,26% tahun 2020 dan 72,65% pada tahun 2021 dari target 95%. Peningkatan kesehatan masyarakat yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) hanya mencapai 78,20% tahun 2020 dari target 95%. Demikian pula halnya dengan program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan hanya mencapai 51,12% tahun 2020 dan 56,21% pada tahun 2021 dari target 90%. Untuk program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mencapai 61,03% tahun 2020 dan 63,26% tahun 2021 dari target 90%. Untuk program pemberdayaan masyarakat yaitu PIS-PK yang dicapai 0% tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian 0% dari target 90%. Untuk Program Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah terealisasi sebesar 45,01% pada tahun 2020 dari target 100%, dan masih menjadi masalah pada tahun 2021 dengan capaian 45,10% dari target 100% ((Puskesmas Lombakasih, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lombakasih, Kabupaten Bombana Tahun 2022”.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini secara *purposive sampling*, untuk mendapatkan data penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Tjokrominoto, 2008). Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman, 2008, juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.

Proses penyusunan perencanaan BOK di Puskesmas Lombakasih terselenggara melalui mini lokakarya tahunan yang dilaksanakan pada akhir tahun. Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan mini lokakarya tahunan adalah semua programmer sebagai pihak pemegang kordinator yang akan menjalankan program melalui dana BOK, Bendahara BOK, dan Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pemimpin tertinggi di Puskesmas, serta KTU (Kepala Tata Usaha) sebagai pihak yang membantu dalam perencanaan BOK. Hal ini sesuai dengan penjelasan informan kunci S sebagai berikut:

*“...Penyusunan perencanaan BOK itu dimulai dari mini lokakarya UKM, jadi semua pelaksana UKM yaitu programmer melakukan diskusi atau minlok UKM. Mereka memasukkan semua jenis-jenis kegiatannya, kemudian waktu, tempat, dan jumlahnya atau frekuensinya kegiatan itu, dari hasil mini lokakarya UKM itu mereka bawa ke mini lokakarya Puskesmas. Dari minlok Puskesmas, lalu membuat penyusunan RUK yang melibatkan Kapus, Bendahara dan ketua pokja UKM. Lalu dimasukkan ke perencanaan BOK. jadi diawali seperti itu...”* (S, 20 Oktober 2022).

Tiap-tiap Programmer membuat perencanaan berdasarkan permasalahan yang ada pada masing-masing program. Seluruh *Programmer* atau pemegang program membuat POA berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang isinya memuat seluruh kegiatan di Puskesmas yang akan dibiayai oleh dana BOK yang berisi volume, lokasi, dan jumlah tenaga yang terlibat. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang. Penyusunan RUK berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya. Kemudian POA yang berisi RUK tersebut akan diajukan kepada pengelola BOK dalam hal ini Bendahara BOK dan Kepala Puskesmas. Selanjutnya, Bendahara BOK mengajukan POA BOK ke Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten yang akan diverifikasi. Hal ini diungkapkan oleh informan biasa HA, berikut penjelasannya:

*“...Proses penyusunan perencanaan BOK itu kita mengajukan dalam bentuk POA pada saat Minlok, jadi permasalahan apa saja yang ada, kita ajukan ke Bendahara BOK. Perencanaan BOK dilakukan dengan melibatkan semua programmer yang ada di Puskesmas...”* (HA, 20 Oktober 2022).

Penyusunan perencanaan di Puskesmas Lombakasih sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurislamiyati et al., 2018) menyatakan bahwa pada dasarnya menyusun perencanaan dana BOK terlebih dahulu harus membuat POA untuk menentukan program apa saja yang akan dilaksanakan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) menyatakan bahwa perencanaan program kesehatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Kesehatan diawali dengan menyusun Plan Of Action (POA) oleh pemegang program kemudian didiskusikan dalam lokakarya mini Puskesmas.

Adapun dasar-dasar yang digunakan oleh Puskesmas Lombakasih dalam penyusunan perencanaan BOK adalah Petunjuk Teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis DAK non fisik tahun 2022 serta disesuaikan dengan target SPM. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan kunci S sebagai berikut:

“...Dasarnya disesuaikan dengan petunjuk teknis dan target SPM (Standar Pelayanan Minimal)...” (S, 20 Oktober 2022).

Hal yang perlu diperhatikan dalam POA BOK di Puskesmas Lombakasih yaitu waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta permasalahan dari masing-masing program yang ditunjang oleh dana BOK harus mencapai cakupan kesehatan sesuai target yang telah ditetapkan dan bisa mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sesuai dengan penjelasan inform kunci S dan GAK berikut ini:

“...Yang perlu diperhatikan itu, yang pertama waktu dan tempatnya. Misalnya, jarak antara Puskesmas dan tempat kegiatannya itu, karena kita disini ada namanya itu daerah yang terpencil, jadi itu harus kita perhatikan betul kita kaitkan dengan cuaca atau iklim/musim. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah cakupan kesehatan sesuai target yang telah ditetapkan dari masing-masing program. Dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah program-program yang masuk dalam SPM. Itu juga perlu kita perhatikan untuk penyusunan POA. Karena program-program SPM itu adalah program yang utama yang didanai oleh BOK...” (S, 20 Oktober 2022).

“...Ya itu ada program yang memang harus diutamakan dia. Program yang masuk dalam SPM. Macam sekarang kan yang lagi viral itu ada stunting, ODGJ, PTM toh penyakit tidak menular, itu dengan HIV. Jadi ada prioritas, jadi pasti perhatian anggaran kesitu lebih banyak biasanya begitu...” (GAK, 21 Oktober 2022).

Dalam penyusunan POA BOK Puskesmas Lombakasih hambatan dalam penyusunan adalah masih kurangnya tingkat pemahaman tim pengelola BOK yaitu *Programmer* terhadap juknis dalam mendukung program BOK, beberapa programmer yang terkadang terlambat memasukkan usulan kegiatan, pengklaiman jumlah frekuensi kegiatan oleh programmer, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan kegiatan, yang dimana kegiatan lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, jadi ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi frekuensinya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh informan kunci S dan GAK, yaitu sebagai berikut:

“...Sebenarnya kalau hambatan banyak. Jadi hambatan-hambatan dalam penyusunan perencanaan BOK diantaranya hambatannya itu kualitas sumber daya manusia tidak pahami, masih kurang pemahaman terhadap juknis. Kemudian terkadang kita sudah menyusun semua kegiatan tiba-tiba anggaran atau pagu anggaran yang diberikan tidak sesuai. Artinya lebih besar di kegiatan itu dari pada pagu anggaran, jadi ada beberapa kegiatan yang harus kita kurangi frekuensinya atau mungkin ada yang kita keluarkan begitu. Apalagi kemarin ini lagi masa pandemi jadi hampir 40% kegiatan dikurangi frekuensinya. Tapi alhamdulillah, saat ini sudah mulai stabil...” (S, 20 Oktober 2022).

“...Ya ada, hambatan misalnya dari program yang terlambat memberikan usulan kegiatannya. Kemudian anggaran, sementara kami itu kalau Puskesmas kan menyusun anggaran itu kan kita sudah diberikan batas pagu. Misalnya untuk Puskesmas Lombakasih, misalnya buat RKA mu, pagu mu sekian. Misalnya 1M jadi kita harus menyesuaikan dengan anggaran yang dikasihkan disini dari usulannya mereka, perencanaan dinas. Disini kemarin ini yang saya hadapi masalahnya ini, teman-teman program kasih masukkan usulan itu banyak banyaaaaak, anggarannya banyak, terus kita menyunnnya itu kan harus dia klop semuanya, mau tidak mau harus tidak sesuai dengan apa yang mereka minta ini program. Misalnya, kaya kemarin kesling mintanya katanya kader 5, tapi tidak akan cukup karena ada juga program-program yang minta diutamakan macam kaya tadi ODGJ, PTM, IVA, itu ada yang jadi prioritas itu minta anggarannya lebih disitu, kaya stunting, gizi, KIA, seperti itu. Jadi ya, kadang tidak sesuai dengan harapan karena anggaran terbatas disitu tadi...” (GAK, 21 Oktober 2022).

Hambatan dalam penyusunan POA BOK di Puskesmas Lombakasih sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yolandia & Hardiana, 2019) yang menyatakan bahwa hambatan dalam perencanaan pengelolaan dana BOK yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia di Puskesmas.

Berdasarkan hasil observasi pada poin perencanaan BOK Puskesmas Lombakasih mencakup semua kegiatan promotive dan preventif. Serta pada POA BOK tercantum jumlah anggaran dari masing-masing kegiatan.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Westra, 2014).

Prosedur pelaksanaan pengelolaan dana BOK di Puskesmas Lombakasih setelah mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan yang direncanakan kegiatan berdasarkan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) yang telah dibuat sesuai perencanaan diawal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci S dan GAK berikut ini:

*"...Jadi setelah mendapat anggaran atau begitu ada anggaran cair ya kita lakukan pelaksanaan kegiatan berdasarkan RUK yang dibuat tadi sesuai dengan perencanaan diawal, jadi tidak boleh meleset karena itu tidak akan dibiayai kegiatan yang tidak ada dalam penganggaran sebelumnya..."* (S, 20 Oktober 2022).

*"...Ya kita susun lagi, kan sudah ada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), kemudian setelah itu kita buat RPK atau Rencana Pelaksana Kegiatan. Disitu kita sudah susun perencanaannya kegiatan ini, anggarannya berapa, kemudian kita sudah buat jadwal pelaksanaan kegiatan diawal misalnya seperti kegiatan kusta, pelacakan itu kita sudah jadwalkan di bulan Januari itu turun berapa orang, anggarannya sekian itu sudah kita susun..."* (GAK, 21 Oktober 2022).

Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BOK di Puskesmas Lombakasih adalah Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara BOK, dan para *Programmer* selaku pelaksana program yang ditunjang oleh dana BOK, dimana tiap-tiap *Programmer* melaksanakan kegiatan sesuai dengan permasalahan setiap program.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan BOK di Puskesmas Lombakasih adalah Surat Tugas dari Kepala Puskesmas, pelaksanaan harus sesuai dengan permasalahan yang ada, anggaran yang terealisasi, dan pencapaian semua kegiatan yang ditunjang oleh dana BOK sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2015 bahwa Kepala Puskesmas harus mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu (Kemenkes RI, 2015).

ketetapan waktu pencairan dana BOK di Puskesmas Lombakasih yaitu tiap triwulan. Ketetapan pencairan dana BOK berdasarkan pertanggungjawaban tiap-tiap Puskesmas yang telah disepakati. Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh informan kunci S, yaitu sebagai berikut:

*"...Ketetapan waktu pencairan dana BOK itu disini kita pencairan dana BOK itu per triwulan, jadi setiap 3 bulan sekali kita cairkan. Tapi, pelaksanaan kegiatannya ya sesuai tiap bulan, Cuma dibayarkan ke program 3 bulan sekali..."* (S, 20 Oktober 2022).

Begitu pula dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan biasa HA, berikut hasil wawancaranya:

*"...Kalau masalah ketetapan pencairannya itu tergantung dari rampungnya pertanggungjawaban dari programmer masing-masing..."*(HA, 20 Oktober 2022).

Mengenai hambatan dalam pelaksanaan BOK, dapat dilihat pada hasil wawancara dengan informan kunci S yaitu kepala Puskesmas, dan GAK sebagai Bendahara BOK. berikut pernyataannya:

*"...Hambatan diawal itulah yang saya bilang, kita sudah melakukan perencanaan tapi pagu anggaran tidak mencukupi sehingga kita harus merevisi ulang kembali apa-apa saja yang harus kita laksanakan. Karena pagu anggaran sangat terbatas sementara kegiatan yang di laksanakan banyak. Sebenarnya semua kegiatan sudah tercover cuma karena keterbatasan di pagu anggaran frekuensinya biasa kita kurangi, yang tadinya sudah direncanakan sebanyak 12 kali tiba-tiba pagu anggarannya turun tidak bisa biayai 12 kali, kemudian kita kurangi jadi misalkan 6 kali. Kalau hambatan pelaksanaan BOK itu tidak terlalu banyak hambatan. Biasanya kalau disini hanya faktor cuaca, kalau dilapangan. Karena kita disini ada daerah sulit, desa Watu-watu sebagian itu, kemudian desa Tinabite ada satu daerah yang sangat sulit untuk dijangkau, kalau musim hujan itu bukan hanya becek tapi sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan, kalau mungkin dekat bisa kita*

*jalan kaki. Jarak kesana saja 9km, masuk kedalam itu luar biasa. Itu kendalanya kalau pelaksanaan kegiatan...” (S, 20 Oktober 2022).*

*“...Banyak sekali juga hambatannya. Disini hambatannya biasanya itu program itu tidak sesuai dengan yang kita sudah jadwalkan, jalannya molor-molor. Kemudian pelaksanaan pelaporannya juga terkadang agak terlambat dilaporkan kegiatannya...” (GAK, 21 Oktober 2022).*

Hasil wawancara menunjukkan hambatan dalam proses pelaksanaan BOK di Puskesmas Lombakasih yaitu jalannya program yang kadang tidak sesuai jadwal, faktor cuaca yang sering kali menghambat pelaksanaan di lapangan sehingga akses untuk menjangkau daerah sulit seperti desa Watu-watu dan desa Tinabite sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dampaknya program tidak berjalan atau terlaksana. Kemudian dari segi penggunaan dana yaitu ketidaksesuaian perencanaan kegiatan dengan pagu anggaran yang diterima serta adanya keterlambatan pelaporan kegiatan. Solusinya jika dana kurang maka pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dana BOK dalam hal ini Kepala Puskesmas, Bendahara BOK, dan *Programmer* harus merevisi kembali frekuensi kegiatan yang akan dilakukan, artinya lebih diutamakan kegiatan yang menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Somaliggi et al., 2020) menyatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan dana BOK yaitu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.

### 3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana (George R. Terry, 2005). Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya (Permenkes, 2015).

Tujuan pengawasan BOK di Puskesmas Lombakasih adalah untuk mengontrol anggaran yang diberikan, program yang dilaksanakan, dan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan Negara atau bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola BOK di Puskesmas Lombakasih ditujukan agar dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan kunci S dan GAK, sebagai berikut:

*“...Agar penggunaan dana dapat terkontrol dan dana BOK bisa dimanfaatkan dengan efektif dan efisien supaya hasil dari kegiatan itu bisa optimal...” (S, 20 Oktober 2022).*

*“...Tujuannya, saya pikir apapun yang berhubungan dengan keuangan dalam hal ini uang negara, pertanggungjawabannya harus perlu ada pengawasan dan bisa di ketahui kinerja pencapaian pelaksanaan kegiatan sejauh mana...” (GAK, 21 Oktober 2022).*

Menurut Kementerian Kesehatan (2015), bentuk pengawasan BOK berupa pengawasan melekat, pengendalian intern, pengawasan fungsional internal yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota, maupun Puskesmas. Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Mekanisme pengawasan melekat di Puskesmas Lombakasih yaitu Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengawasi secara umum dan sebagai penanggung jawab di Puskesmas dalam segala bentuk kegiatan yang terkait dana BOK, PPK yang bertanggungjawab mengawasi anggaran dan keuangan, serta PPTK yang bertanggungjawab mengawasi kegiatan yang ditunjang oleh dana BOK. Terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan BOK di Puskesmas Lombakasih PPK dan PPTK turun ke lapangan secara langsung mengecek dan memantau kegiatan yang dilakukan kemudian memeriksa laporan pertanggungjawaban kegiatan, memeriksa pembayaran, frekuensi, dan item-item kegiatan apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai selanjutnya PPK dan PPTK menandatangani laporan tersebut dan menyerahkan ke KPA atau Kepala Puskesmas untuk di verifikasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan kunci S dan GAK berikut ini:

*“...BOK diawasi langsung oleh BPK dan Inspektorat. Jadi, Puskesmas yang diawasi. Kemudian Puskesmas mempunyai nama PPK sehingga menjadi penanggungjawab pengawas anggarannya. Kemudian ada PPTK yang diawasi adalah kegiatannya. Ada dua pengawas di Puskesmas yaitu PPK dan PPTK. Jadi, pengawasan secara keseluruhan adalah inspektorat dan BPK. itulah secara umum. Tetapi biasanya yang diperiksa adalah Kepala Puskesmas dan Bendahara dulu. Kecuali ada temuan, itulah namanya telusur, kemudian di telusuri ke program. Tetapi kalo pengawasan internalnya adalah PPK dan PPTK...”* (S, 20 Oktober 2022).

*“...Ada kuasa pengguna anggaran dalam hal ini kapus. PPK dan PPTK...”* (GAK, 21 Oktober 2022).

Instansi pengawasan fungsional kegiatan BOK secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP. Instansi ini bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana BOK. Untuk pengawasan fungsional di Puskesmas Lombokasih berdasarkan wawancara terhadap informan kunci menyatakan bahwa pengawasan hanya dilakukan oleh Inspektorat saja dan hanya memeriksa Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK saja. Apabila terdapat temuan maka pengawas fungsional akan melakukan penelusuran ke program.

Instansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalah pengawasan yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK. Untuk pengawasan eksternal di Puskesmas Lombokasih dilakukan oleh BPK untuk memantau pemanfaatan dana BOK di Puskesmas, biasanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Adapun keterlibatan pihak Puskesmas dalam pelaksanaan pengawasan di Puskesmas Lombokasih yaitu Puskesmas secara langsung diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPK. Sedangkan, didalam lingkup Puskesmas Kepala Puskesmas, PPK dan PPTK yang bertanggungjawab mengecek pembayaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan

#### **4. Pencatatan dan Pelaporan**

Pencatatan adalah kegiatan pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, file komputer, grafik, gambar dan suara. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang kemudian hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Lombokasih perlu dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban hasil kegiatan yang ditunjang oleh dana BOK.

Terkait proses pencatatan dan pelaporan pelaksanaan BOK di Puskesmas Lombokasih bahwa pencatatan dan pelaporannya dilakukan oleh masing-masing *Programmer* yang berisi kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Laporan hasil kegiatan kemudian di setor ke Bendahara BOK di akhir bulan sebagai laporan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari informan kunci S dan GAK berikut ini:

*“...Jadi pencatatan ini dilakukan pada saat memberikan pelayanan, jadi yang dicatat itu kegiatan atau tindakan yang diberikan, Pelaporannya yah seperti tadi, ada laporan ke Dinas Kesehatan, ada laporan untuk ke SPJ BOK. Kalau ke Dinas Kesehatan dilaporkan setiap bulan rutin, kalau ke SPJ BOK setiap 3 bulan sekali...”* (S, 20 Oktober 2022).

*“...Semua pembayaran yang sudah dibayarkan program itu, masing-masing semua di catat dalam bentuk disitu dituangkan seperti dalam BKU disitu tertera semua bayar pada ini berapa jumlah uangnya, kemudian berapa uang yang dicairkan, berapa permintaan TUNYA kita, kemudian adakah pengembalian TUNYA kita, adakah pajak...”* (GAK, 21 Oktober 2022).

Adapun waktu pencatatan dan pelaporan BOK di Puskesmas Lombokasih yaitu setiap tiga bulan sekali atau pertriwulan termasuk pencairan dana BOK. Sedangkan kegiatan atau program yang ditunjang oleh dana BOK dicatat setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan mengetahui Kepala Puskesmas setiap akhir bulan, dengan toleransi keterlambatan 5 hari setelah bulan berjalan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kurniati, 2020) menyatakan bahwa pencatatan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Kesehatan dilaporkan setiap bulan kepada ketua tim BOK yaitu penanggungjawab Puskesmas.

Hal-hal yang perlu dicatat dan dilaporkan dalam pelaksanaan BOK di Puskesmas Lombakasih adalah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yaitu berapa jumlah anggaran dan siapa penerima anggaran. Semua laporan hasil kegiatan masing-masing *Programmer*, cakupan pencapaian target, serta semua transaksi pembayaran ke program.

Terkait indikator keberhasilan dalam pencatatan dan pelaporan BOK di Puskesmas Lombakasih yaitu berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Selain SPM penetapan indikator keberhasilan program Puskesmas BOK di Puskesmas Lombakasih juga berdasarkan petunjuk teknis. Cakupan pencapaian indikator program kesehatan, yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber biaya termasuk BOK. Target ditetapkan oleh masing-masing Puskesmas serta Kabupaten/Kota (Kemenkes RI, 2015b). Berikut hasil wawancara dengan informan kunci S dan GAK:

*"...Ketetapan indikator keberhasilan BOK berdasarkan SPM Karena kita menetapkan dulu Standar Pelayanan Minimal berapa persen.Minimal kalau sekarang itu untuk KIA itu harus 100%, imunisasi 90%.Jadi tingkat keberhasilan BOK itu diukur berdasarkan SPM.Ya jadi kalau pelaksanaan BOK itu 100% daripada SPM ya itu yang diharapkan, berarti pemerintah tidak sia-sia menganggarkan anggaran kesehatan. Kalau SPM nya hanya tercapai misal 20% kasian uang negara sudah dipakai baru keberhasilannya sangat rendah. jadi, itu tadi ada SPM..."* (S, 20 Oktober 2022).

*"...Kalau indikatornya kita mengikut sama SPM (Standar Pelayanan Minimal) ..."* (GAK, 21 Oktober 2022).

Mengenai pencatatan dan pelaporan ketika tidak sesuai dengan perencanaan dapat dilihat pada hasil wawancara dengan informan kunci S sebagai Kepala Puskesmas, berikut ini:

*"...Jadi kalau hanya pencatatan ji yang mungkin kurang, bisa dibenahi ya termasuk pelaporan. Yang pokok, terpenting ini adalah kegiatan yang benar-benar sudah dilaksanakan. Tetapi kalau kegiatannya tidak berhasil tidak sesuai dengan perencanaan, maka perlu dilakukan perencanaan kembali selama tadi belum masuk dalam perubahan. Misalnya kita lakukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kegiatan di bulan maret-april, itu masih bisa kita lakukan perbaikan, terutama nanti di perubahan bisa kita lakukan. Jadi pada tahap-tahapnya tidak serta merta kita lakukan perubahan ditengah jalan, tetap kita melakukan perbaikan sambil jalan tetapi tidak bisa merubah atau menambah langsung, melainkan kita nanti benahi di perubahan anggaran..."* (S, 20 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci S, ketika pencatatan dan pelaporan tidak sesuai dengan perencanaan, maka solusi atau cara mengatasinya yaitu dibenahi dengan cara dilakukan perubahan, dengan tahap-tahap tertentu, dengan tetap melakukan perbaikan sambil terus menjalankan kegiatan. Artinya pihak yang terlibat tidak dapat merubah atau menambah langsung, melainkan akan dilakukan pembenahan di perubahan anggaran.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

1. Perencanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lombakasih yaitu setiap programmer membuat RUK sesuai permasalahan program masing-masing serta dibahas dalam rapat mini lokakarya. Pihak yang terlibat dalam mini lokakarya yaitu Kepala Puskesmas, Bendahara BOK, dan seluruh programmer yang menjalankan program. Dasar yang digunakan yaitu petunjuk teknis pengelolaan BOK serta disesuaikan dengan target SPM. Hambatan dalam perencanaan adalah masih kurangnya tingkat pemahaman tim pengelola BOK yaitu *Programmer* terhadap juknis dalam mendukung program BOK, beberapa programmer yang terkadang terlambat memasukkan usulan kegiatan, dan pengklaiman jumlah frekuensi kegiatan oleh programmer.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lombakasih yaitu melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan yang direncanakan berdasarkan RUK (Rencana Usulan Kegiatan) yang telah dibuat sesuai perencanaan diawal. Hambatan dalam pelaksanaan jalannya program yang kadang tidak sesuai jadwal, faktor cuaca yang sering kali menghambat pelaksanaan di lapangan sehingga dampaknya program tidak berjalan atau terlaksana.
3. Pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lombakasih dilakukan oleh Kepala Puskesmas, PPK, dan PPTK. Dimana PPK dan PPTK

turun ke lapangan secara langsung mengecek dan memantau kegiatan yang dilakukan kemudian memeriksa laporan pertanggungjawaban kegiatan, memeriksa pembayaran, frekuensi, dan item-item kegiatan apakah sudah sesuai sebelum akhirnya diserahkan ke Kepala Puskesmas. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat hanya memeriksa atau mengaudit Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK saja. Apabila terdapat temuan maka pengawas fungsional akan melakukan penelusuran ke program. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh BPK untuk memantau pemanfaatan dana BOK di Puskesmas, biasanya dilakukan satu kali dalam setahun.

4. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lombokasih dilakukan oleh bendahara BOK untuk dipertanggungjawabkan kepada Dinas Kesehatan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya Puskesmas sering tidak tepat waktu dalam melakukan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

## **SARAN**

1. Diharapkan kepada pimpinan Puskesmas dalam hal ini Kepala Puskesmas Lombokasih agar selalu memberikan pengarahan atau masukan mengenai pelaksanaan perencanaan agar perencanaan yang dilakukan pihak Puskesmas dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
2. Pihak Puskesmas disarankan untuk memberikan pemahaman yang merata tentang mekanisme pelaksanaan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan. Dan untuk pemegang program diharapkan agar membuat pertanggungjawaban laporan kepada bendahara agar tepat waktu, agar Puskesmas Lombokasih dapat memberikan pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar meningkatkan variabel yang ada dalam penelitian ini apabila menjadikan skripsi ini sebagai referensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Kemenkes RI. Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 2015;
2. Yuliantini NND, Cantyawati PL, Pratiwi NWI, Indrayani NW. Eksistensi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Terhadap Peningkatan Kinerja Puskesmas Buleleng I, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng-Bali. *J Ilm Akunt dan Humanika*. 2019;8(2):176–80.
3. Kemenkes RI. Hasil Survey Cepat Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik . 2016;c.
4. Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara. Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara Tahun 2021. 2021.
5. Dinkes Bombana. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2021. 2021.
6. Lombokasih P. Profil Puskesmas Lombokasih Tahun 2021. Kabupaten Bombana; 2021.
7. Puskesmas Lombokasih. Profil Puskesmas Lombokasih 2021. 2021.
8. Tjokrominoto B. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Perencanaan. Jakarta; 2008. 53–27 p.
9. Usman H. Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara; 2008.
10. Nurislamiyati F, Maryati H, Chotimah I. Gambaran Fungsi Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Program Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) di UPTD Puskesmas Tegal Gundul Kota Bogor Tahun 2018. 2018;4.
11. Kurniati DN. Analisis Pengelolaan Kesehatan (BOK) di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. 2020; Available from: <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/3874>
12. Yolandia RA, Hardiana H. Alternatif Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Cakupan K1-K4. 2019;
13. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. 2015;
14. Somaliggi N, Kamalia, Munir S. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Realisasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Kendari. *Keperawatan dan Kesehat Masy*. 2020;9.
15. George R. Terry. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara; 2005.